

# ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2013

Ni Luh Putu Oka Andriani dan Lia Yuliana

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik  
E-mail: reikawa@ymail.com, lia@stis.ac.id

**Abstrak:** Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan anggaran belanja modal. Berdasarkan data dan hasil kajian yang ada, ditemukan fakta bahwa realisasi belanja modal pada APBD masih berada di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang tersedia (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2012). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal 32 provinsi di Indonesia masih tergolong rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia. Sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia.

Kata kunci: belanja modal, pad, dana perimbangan, silpa, regresi data panel

*Abstract:* Local autonomy aims to improve the economy of the region and the well-being of the community through public service. One way to improve the public services is to increase the capital expenditures budget. Based on the data and the results of the study, it is found that the realization of capital expenditures in the BUDGETS are still below target or lower compared to the available budget (Directorate General of Fiscal Balance, 2012). The purpose of this research was to analyze the effect of PAD, the balance funds (DAU, DAK, DBH) and SiLPA towards the capital expenditure of the 32 provinces in Indonesia in 2010-2013. The study uses panel data regression analysis. The results showed that capital spending of the 32 provinces in Indonesia is still classified as low. The results of the analysis showed that the PAD, DBH and SiLPA influence significantly to capital spending of the 32 provinces in Indonesia. While DAU and DAK has no significant effect against the capital expenditure of the 32 provinces in Indonesia.

*Key words:* capital expenditure, pad, balance funds, silpa, panel data regression analysis

## PENDAHULUAN

Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan meningkatkan belanja modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Mayzestika Maharani, 2010).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kebijakan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 beberapa sumber-sumber penerimaan daerah di antaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut tiap tahun cenderung meningkat. Dengan adanya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, diharapkan dapat meningkatkan anggaran belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Namun yang terjadi adalah peningkatan sumber penerimaan daerah tidak selalu diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal pemerintah provinsi di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal rata-rata masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Anggaran belanja hanya terkonsentrasi pada belanja-belanja yang bersifat

rutin dan mengesampingkan belanja modal. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2013.

Penelitian oleh Mariam Abdul Aziz et.al (2000), Doi (1998), dan Von Furstenberg (1998), dalam hipotesis penelitiannya menyatakan bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan memengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah atau yang dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dimana pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaannya. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami peningkatan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan regresi linear berganda data panel.

## PEMBAHASAN

**Pengertian Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

**Belanja modal;** merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)

**Pendapatan Asli Daerah (PAD);** merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004)

**Dana Alokasi Umum (DAU);** merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

**Dana Alokasi Khusus (DAK);** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang nilainya ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Oleh sebab itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya menjadi wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.

**Dana Bagi Hasil (DBH);** merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Prinsip pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Dana bagi hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);** adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup realisasi penerimaan PAD, realisasi penerimaan dana perimbangan, realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. (Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)

### Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan selain dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yaitu belanja pengawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

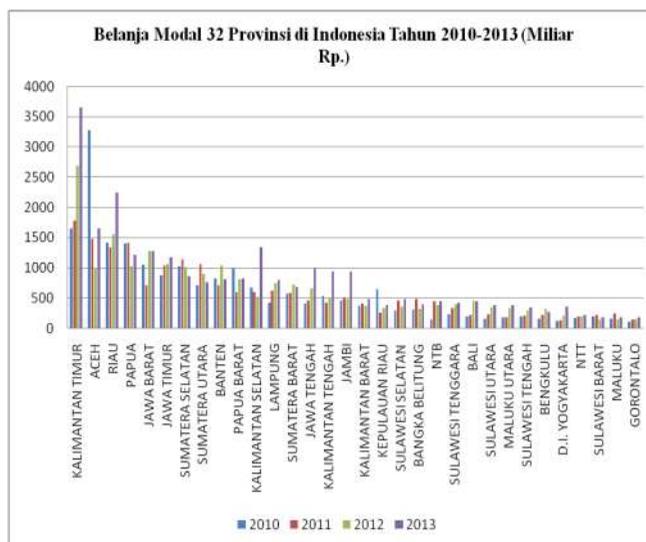
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011), diperoleh hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Jadi besarnya SiLPA memengaruhi tingkat belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal.

Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH merupakan sumber pendapatan daerah (dana transfer) yang berasal dari pemerintah pusat. Holtz-Eakin et.al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal. Legrenzi dan Milas (2001) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang dana transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan pada belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Dian Rachmayani (2010) yang memberi kesimpulan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh DAU, DAK, dan DBH.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan Belanja Modal

Dari 32 provinsi di Indonesia, hanya sepuluh provinsi yang nilai belanja modalnya terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2013, sebagian besar berfluktuasi selama periode penelitian, seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Belanja Modal 32 Propinsi di Indonesia Tahun 2010 - 2013 (dalam Milyar Rp)



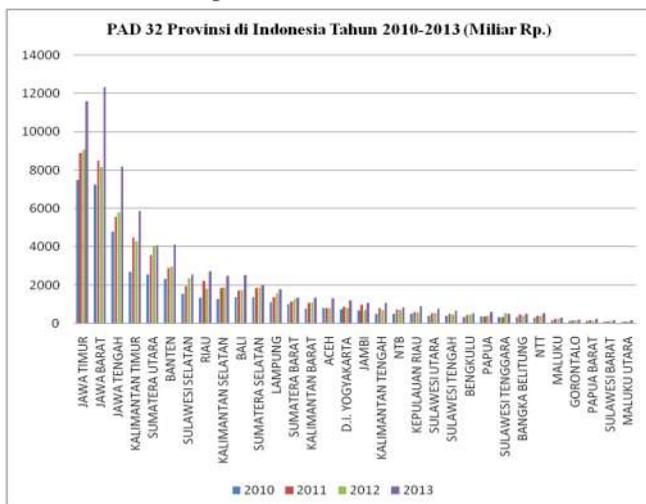
Sumber: Publikasi Statistik Keuangan BPS Tahun 2010-2013, diolah

Dari Tabel 1 terlihat bahwa provinsi dengan belanja modal yang masih sangat rendah di antaranya adalah Maluku, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Belanja modal provinsi-provinsi tersebut rata-rata berada di bawah 200 miliar rupiah.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagian besar PAD provinsi menunjukkan tren positif selama periode penelitian, seperti terlihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2.** PAD 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013 (Miliar Rp.)



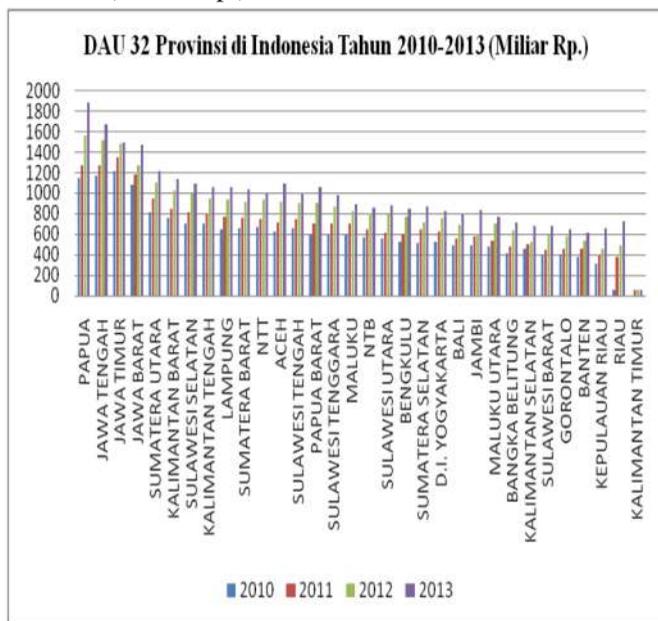
Sumber: Publikasi Statistik Keuangan BPS Tahun 2010-2013, diolah

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa Provinsi dengan nilai PAD tertinggi selama periode penelitian yaitu provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PAD Jawa Barat dan Jawa Timur meningkat cukup tajam pada tahun 2013.

**Dana Alokasi Umum (DAU)**

Secara umum DAU merupakan sumber penerimaan terbesar dan nilainya selalu mengalami peningkatan sepanjang tahun penelitian seperti terlihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3.** DAU 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013 (Miliar Rp.)



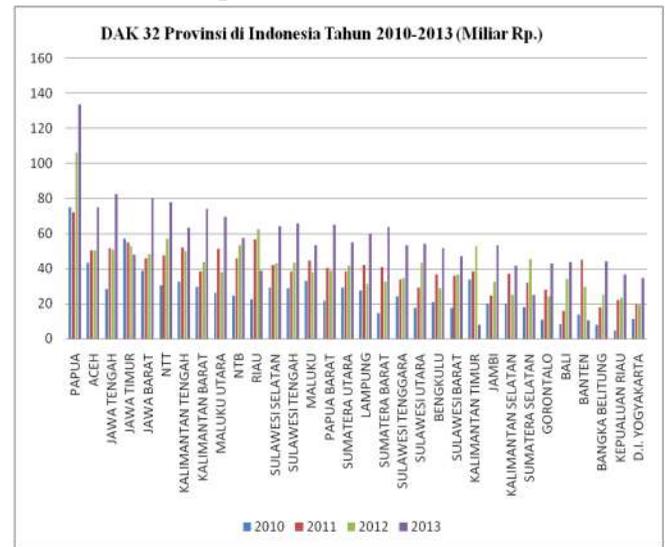
Sumber : Publikasi Statistik Keuangan BPS Tahun 2010-2013, diolah

Dari tabel 3 terlihat bahwa pada tahun 2013, Provinsi Papua menerima DAU yang paling besar jika dibandingkan DAU provinsi lain pada masing-masing tahun penelitian. Besaran DAU tersebut yaitu Rp.1.889,268 miliar. Sedangkan DAU yang paling rendah diterima oleh Kalimantan Timur sepanjang tahun penelitian.

**Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus pada 18 provinsi memiliki nilai yang fluktuatif, sedangkan 14 provinsi lainnya mengalami tren positif selama periode penelitian, seperti terlihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4.** DAK 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013 (Miliar Rp.)



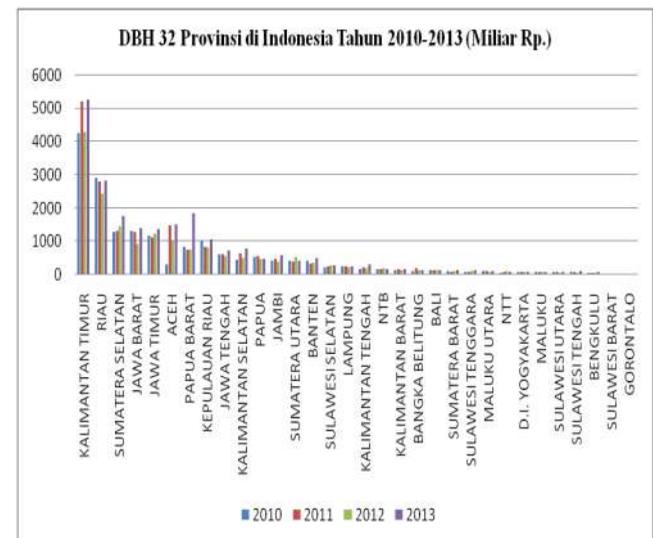
Sumber: Publikasi Statistik Keuangan BPS Tahun 2010-2013, diolah

Papua merupakan provinsi dengan penerimaan DAK tertinggi sepanjang periode penelitian. Sedangkan provinsi dengan penerimaan DAK terendah diantaranya yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan D.I. Yogyakarta.

**Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)**

Penerimaan DBH cukup fluktuatif dan sebagian besar masih berada di bawah 500 miliar rupiah seperti terlihat pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5.** DBH 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013 (Miliar Rp)



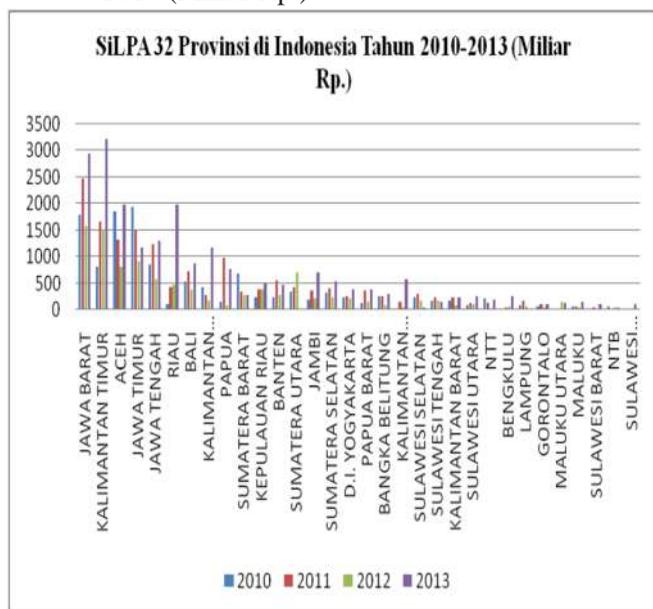
Sumber: Publikasi Statistik Keuangan BPS Tahun 2010-2013, diolah

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa hanya ada empat provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. yang penerimaan Dana Bagi Hasilnya mengalami tren positif dari tahun 2010 hingga 2013. Sedangkan provinsi dengan penerimaan DBH yang terus mengalami penurunan dari tahun 2010-2013 yaitu Provinsi Gorontalo.

**Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Nilai SiLPA cukup fluktuatif, hanya tiga provinsi yang nilai SiLPAny mengalami tren positif dari tahun 2010 hingga 2013, seperti terlihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6.** SiLPA 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013 (Miliar Rp.)



Sumber : Publikasi Statistik Keuangan BPS Tahun 2010-2013, diolah

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa provinsi-provinsi yang mengalami tren positif adalah Provinsi Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Dilihat dari peningkatannya, pada tahun 2013, nilai SiLPA ketiga provinsi tersebut juga melonjak cukup tajam dibanding tahun sebelumnya. Sulawesi Barat, NTB, dan Sulawesi Tenggara adalah provinsi dengan SiLPA terendah. SiLPA terendah selama periode penelitian yaitu sebesar Rp.8,328 dicapai oleh provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2011. Sedangkan Jawa Barat dan Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan SiLPA tertinggi.

Tahapan Analisis Regresi Data Panel, seperti terlihat pada Tabel 7 berikut:

**Tabel 7.** Fixed effect model belanja modal 32 provinsi di Indonesia

Dependent Variable : Belanja_Modal?				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	534,4413	119,6172	4,467931	0,0000
PAD?	0,099663	0,041908	2,378165	0,0195
DAU?	0,226438	0,239585	0,945129	0,3471
DAK?	-2,581219	2,306451	-1,119130	0,2660
DBH?	-0,563764	0,130664	-4,314594	0,0000
SiLPA?	0,511204	0,076874	6,649861	0,0000
Fixed Effect (Cross)				
ACEH_C	102,078	NTB_C	-218,4044	
SUMUT_C	-91,05085	NTT_C	-445,3085	
SUMBAR_C	-236,6770	KALBAR_C	-324,7496	
RIAU_C	2097,444	KALTENG_C	-40,84554	
JAMBI_C	5,353317	KALSEL_C	96,16597	
SUMSEL_C	855,8356	KALTIM_C	3319,060	
BENGKULU_C	-408,6663	SULUT_C	-403,8705	
LAMPUNG_C	-17,78790	SULTENG_C	-440,2566	
BABEL_C	-290,4212	SULSEL_C	-374,9807	
KEPRI_C	92,51044	SULTRA_C	-274,8417	
JABAR_C	-924,3003	GORONTALO_C	-477,0186	
JATENG_C	-837,3676	SULBAR_C	-387,9035	
YOGYA_C	-595,1951	MALUKU_C	-422,6318	
JATIM_C	-600,7456	MALUKUUTARA_C	-273,1946	
BANTEN_C	-4,263525	PAPUABARAT_C	648,9151	
BALI_C	-699,9849	PAPUA_C	648,1045	
Weighted Statistics				
R-squared	0,900044	F-statistic	22,76114	
Adjusted R-Squared	0,860501	Prob(F-statistic)	0,0000	
		Durbin Watson-stat	2,144779	

Diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BelanjaModal_{it} = 534,44 * y_i + 0,09 PAD_{it} + 0,23 DAU_{it} - 2,58 DAK_{it} - 0,56 DBH_{it} + 0,51 SiLPA_{it}$$

Keterangan: \* = signifikan pada taraf uji lima persen; y<sub>i</sub> = efek individu

PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia. Kenaikan PAD sebesar satu satuan akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,09 miliar rupiah atau 90 juta rupiah dalam kondisi *ceteris paribus*. Hal ini sejalan dengan Mariam Abdul Aziz et.al (2000); Doi (1998); dan Furstenberg (1998), yang menyatakan bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan memengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan

Siswanto (2012). DAU bersifat “*block grant*”, memungkinkan daerah menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sejalan dengan Darmayasa (2014). Hal tersebut disebabkan oleh besaran alokasi DAK yang relatif kecil.

Berbeda dengan DBH, yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, tetapi DBH memberi pengaruh yang negatif terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jiwatami (2013). Setiap kenaikan DBH sebesar satu satuan, maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 0,56 miliar rupiah atau 560 juta rupiah dalam kondisi *ceteris paribus*.

SiLPA berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia pada taraf uji lima persen. Kenaikan SiLPA sebesar satu satuan akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,51 miliar rupiah atau 510 juta rupiah dalam kondisi *ceteris paribus*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Selama periode 2010-2013, belanja modal 32 provinsi di Indonesia tergolong rendah. PAD dan DAU menjadi sumber penerimaan terbesar. DBH dan SiLPA cukup berfluktuasi selama periode penelitian. DAK cukup berkontribusi terhadap penerimaan daerah, namun tidak sebesar penerimaan daerah lainnya.
2. Dari hasil regresi dapat disimpulkan bahwa PAD dan SiLPA berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia pada taraf uji lima persen. DBH signifikan tetapi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia.

### Saran-saran

#### 1. Untuk Pemerintah Pusat

- a. Perlu melakukan upaya percepatan informasi transfer yang meliputi alokasi DAU, DAK, DBH kepada daerah sebelum tahun anggaran dimulai sehingga daerah dapat

mencantumkan angka yang relatif optimis dalam perencanaan APBD khususnya dalam mengalokasikan anggaran belanja modal agar penyerapannya dapat lebih optimal.

- b. Memperjelas petunjuk teknis DAK untuk tiap-tiap provinsi dan ketepatan penerbitan petunjuk teknis tersebut agar tidak terjadi keterlambatan. Rendahnya realisasi belanja modal di daerah khususnya yang didanai dari DAK tidak hanya disebabkan oleh kurang berjalannya fungsi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah dengan baik, namun juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terutama yang terkait dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran, mekanisme transfer ke daerah, dan penetapan petunjuk teknis DAK yang terlambat sehingga menyebabkan belanja daerah yang bersumber dari DAK tidak dapat terserap secara maksimal.

#### 2. Untuk Pemerintah Provinsi

- a. Agar lebih memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran belanja modal. Pemerintah provinsi harus mengupayakan agar alokasi anggaran untuk belanja modal lebih ditingkatkan agar dapat melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga bisa memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meminimalisir SiLPA dengan memperbesar anggaran belanja modal yang dapat menambah aset tetap pemerintah yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dengan menggunakan variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian seperti pertumbuhan ekonomi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta rentang waktu penelitian diperpanjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. UNDIP. Semarang. 2011.
- Darmayasa dan I Ketut Suandi. *Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi*. Politeknik Negeri Bali. Bali. 2014.

- Dian Rachmayani. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung. 2010.
- Doi, Takero. *Is Japanese Local Finance Really Centralized? From Viewpoint of The Revenue-Expenditure Nexus*. University of Tokyo, Working Paper. 1998. hal. 3-4
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S & Schuyley Tilly." Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests". *Journal of Urban Economics*. 1994: hal. 159 – 174.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal". *Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*. Vol.15. 2012: hal.6.
- Legrenzi, Gabriella dan Costas Millas. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper. 2001. hal.6-7
- Mariam Abdul Aziz, Muzafar Shah Habibullah, W. N. W. Azman - Saini, dan M. Azali. *The Causal Relationship between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia*. Universiti Putra Malaysia, Working Paper. 2000. hal. 64
- Mayzestika Maharani. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal*. Skripsi. UNS. Surakarta. 2010.
- Von Furstenberg, George M., R. Jeffery Green, dan Jin-Ho Jeong. "Tax and spend, or spend and tax?". *The review of Economics and Statistics*, Vol. 68, No. 2 1986. hal. 180.